

# DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lt. II Telp. 2027698 e-mail: <a href="mailto:dp3appkb@tarakankota.go.id">dp3appkb@tarakankota.go.id</a> TARAKAN (77121)



### RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2025

inas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan Tahun 2025.

Rencana Aksi Kinerja ini disususn sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan bertujuan untuk melihat terpenuhinya berbagai dokumen perencanaan, termasuk monitoring dan evaluasi laporan serta kinerja seluruh bidang atas tupoksinya masing-masing ang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas partisipasinya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Tarakan, 2 Januari 2025

Mengetahui; KEPALA DP3APPKB,



HASMAN PARIGI, S.E., M.M Pembina Tingkat I / IVb NIP. 19720822 2010011 001





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	AN JUD	UL	i
KATA PE	ENGAN	TAR	ii
DAFTAR	ISI		iii
BAB I	PENI	DAHULUAN	
	1.	Latar Belakang	1
	2.	Dasar Hukum	2
	3.	Tujuan Rencana Aksi	3
BAB II	RENG	CANA AKSI	
	1.	Sasaran Strategis	4
	2.	Indikator Kinerja Utama	4
	3.	Perjanjian Kinerja	7
	4.	Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025	9
RAR III	PENI	JTT JP	2/



# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sehingga diperlukan rencana aksi yang menggambarkan dan menjabarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada perjanjian kinerja. Secara harfiah, Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang dilaksanakan dengan cara membuat dokumen yang menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu program kerja. Rencana aksi ini sangat penting karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan tersebut harus diselesaikan.

Sedangkan Perjanjian Kinerja yang termaktub dalam Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lebih lanjut, Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja yang harus memenuhi kriteria seperti spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu serta dapat dipantau dan dikumpulkan.

Maka melalui dokumen ini, diharapkan indikator dan target kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagaimana amanat dalam RPJMD Kota Tarakan serta sebagai salah satu bentuk komitmen dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anbak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan dalam mewujudkan *Good Governance*. Dimana kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk





kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Kinerja yang tidak hanya dilihat pada tahun yang bersangkutan, tetapi juga dipengaruhi oleh kegiatan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa kinerja dalam pemerintahan harus mengedepankan kesinambungan dan pencapaian jangka panjang. Penilaian dan pengelolaan kinerja harus dilakukan secara holistik dengan memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan yang dijalankan.

#### 1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Aksi ini adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
- 7. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 9. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tetang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 12. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja



# 1.3 Tujuan Rencana Aksi

Pada dasarnya, tujuan umum dari diterapkannya Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
- d. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- e. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.



# BAB II RENCANA AKSI

# 2.1 Rencana Strategis

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dengan kata lain, sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam bentuk yang lebih spesifik sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dimana sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian masing-masing.

# 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dimana Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan yang sudah tercapai.

Dalam rencana aksi, Indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan dan sasaran dalam program kegiatan dapat tercapai. Maka untuk dapat berfungsi dengan efektif dan efisien, Indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana aksi harus dapat memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut :



# R ENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2025 DP3APPKB KOTA TARAKAN



- 1. Spesifik yaitu harus jelas dan terfokus pada suatu hasil yang dapat diukur.
- 2. Terukur (Measurable) yaitu dapat dihitung atau diukur dengan angka, prosentase, atau data kuantitatif.
- 3. Tercapai (Achievable) yaitu sasaran yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 4. Relevan (Relevant) yaitu harus terkait langsung dengan tujuan dan kebutuhan program kerja.
- 5. Terikat Waktu (Time-bound) yaitu harus ada batas waktu yang jelas kapan hasil atau target tersebut harus tercapai.

Dari kriteria diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IKU harus dijadikan bagian integral dari rencana aksi, yang artinya bahwa setiap langkah dalam rencana aksi akan berhubungan langsung dengan pengukuran kinerja. Dengan mengintegrasikan IKU, setiap langkah dalam rencana aksi bisa lebih terfokus dan terukur, memberikan gambaran jelas tentang pencapaian yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya. Dalam konteks meningkatkan kualitas pelayanan publik, rencana aksi yang berfokus pada pencapaian target IKU dapat membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perangkat daerah.

Berikut disajikan tabel data mengenai Indikator kinerja utama (IKU) yang sesuai dengan Renstra DP3APPKB Kota Tarakan.

# Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 -2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024			TARGET	TAHUN			KET.
110.	INDIKATOR	SATOAN	DASCEINE TATION 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
-1	-2	-3	-1	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Tujuan									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0.352	0.351	0.35	0.34	0.332	0.331	0.3	
2.	Predikat Kota Layak Anak		Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	66.67	66.9	67.12	67.35	67.68	68.68	69.68	
	Sasaran									
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92.79	92.8	93	93.5	94	94.5	95	
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68.54	68.6	68.8	69	69.5	69.64	69.74	
3.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	persentase	0.00026	0.00025	0.00024	0.00023	0.00022	0.00021	0.0002	
4.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	persentase	0.00098	0.00097	0.00096	0.00095	0.00094	0.00093	0.00092	
5.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.16	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.19	
6.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	persentase	60.4	62	62.5	62.8	63	63.3	63.5	
7.	Nilai SAKIP	angka	85.87	85.9	86	86.5	87	87.5	88	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.74	88.74	88.75	88.76	88.77	88.78	88.79	

Sumber : Dokumen Perencanaan DP3APPKB Kota Tarakan

D







Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam SAKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), karena indikator ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah berhasil atau gagal dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

# 2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dimana perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja yang tertera dalam program dan kegiatan instansi.

Pada dasarnya, perjanjian kinerja adalah sebuah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, efektif dan efisien dalam waktu satu tahun kegiatan. Berikut disajikan tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025, yaitu sebagai berikut:





Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender	92,8 (indeks)
		Indeks Pemberdayaan Gender	68,6 (indeks)
2	Meningkatkan Perlindungan	Prevalensi Kekerasan	0.00025
	Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	Terhadap Anak (KtA)	(persentase)
		revalensi kekerasan terhadap perempuan	0.00097
		(KtP)	(persentase)
3	Terwujudnya Kesejahteraan	Angka kelahiran total	2,24 (Rata-rata
	Keluarga	(Total Fertility Rate/TFR) per WUS	Anak per
		usia 15-49 Tahun	Wanita)
		Angka Prevalensi Kontrasepsi	62,00
		Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	(persentase)
4	Meningkatnya Tata Kelola Dinas	Nilai SAKIP	85,9 (angka)
	Pemberdayaan Perempuan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,75 Indeks
	Perlindungan Anak serta		
	Pengendalian Penduduk dan		
	Keluarga Berencana		

Sumber: Dokumen Perencanaan tahun 2025 DP3APPKB Kota Tarakan

Dimana perjanjian kinerja diatas, diturunkan menjadi beberapa program dan kegiatan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya baik dari APBN atau APBD.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berikut disajikan tabel data program DP3APPKB Kota Tarakan tahun 2025.





Tabel 3. Program dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	127.672.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	267.594.580
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	35.150.180
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER	4.589.200
	DAN ANAK	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	225.947.750
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	362.921.370
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	231.951.400
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.118.546.000
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	637.219.750
	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.216.024.743
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	TOTAL	7.227.616.973

# 2.4 Rencana Aksi Capaian Kinerja Tahun 2025

Rencana aksi capaian kinerja untuk tahun 2025 merupakan strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan dan target tertentu dalam jangka waktu 1 tahun. Rencana aksi kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Sehingga penting untuk menyusun program dan kegiatan beserta anggarannya agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, dengan adanya rencana aksi maka akan membantu memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun sehingga tidak akan terjadi kegiatan yang tumpang tindih ataupun kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga perencanaan di awal kegiatan sangat dibutuhkan.

Rencana aksi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan oleh instansi pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi membantu untuk memetakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu, misalnya satu tahun anggaran, sehingga setiap langkah yang diambil sudah terstruktur dengan jelas. Hal ini sangat berguna untuk menghindari tumpang tindih kegiatan atau bahkan kegiatan yang tidak terlaksana, yang sering kali terjadi tanpa perencanaan yang matang.

#### RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAR	GET		PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN (Rp)			JAL	OWAL K	EGIATA	V	
STRATEGIS	RIVERJA								REGIATAL		( <i>Np)</i>	ТИ		TW 2		TW 3		TW 4
												1 2	2 3	4 5	6	7 8	9 10	11 12
		TR1	TR2	TR3	TR4													
1	2			3		4	9	10	11		12				13			
Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan						Program Pengarusutamaan Gender d	an Pemberdayaan Perempuan	Cakupan PUG yang aktif	1. 12%		338.388.800							
	IPG					Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	I lembaga	Melaksanakan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	38.388.800							
		0,00%	89,06%	11%	0%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	30 OPD	Melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	38.388.800							
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina	2 lembaga	Melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000							
	IDG	100%	0%	0%	0%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	Melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000							
Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)					PROGRAM PERLINDUNGAN PERI	EMPUAN	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	1. 100%		291.610.990							

Perempuan dan Perlindungan Hak Anak					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	Melaksanakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.441.680			
	41,26%	20,09%	31,45%	7,2%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	69.441.680			
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang mendapat pelayanan	20 kasus	Melaksanakan kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	203.318.090			
	32,45%	61,82%	5,20%	0,52%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	melaksanakan pelayanan kasus KDRT sesuai SOP	115.554.400			
			50,66%	49,34%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	87.763.690			
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	Melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.851.220			
			100%		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.851.220			

			PROGRAM PENINGKATAN KUAL	ITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak	35%		45.458.000			
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan informasi kesetaraan gender dan hak anak	100 keluarga	Melaksanakan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.344.200			
		100%	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Melaksanakan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	13.946.000			
	50%	50%	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Melaksanakan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.398.200			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	Melaksanakan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan PeningkatanKualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.174.800			
		100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 orang	Melaksanakan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.174.800			
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 layanan	Melaksanakan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.939.000			

		100%	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 layanan	Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.939.000					
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTE	M DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	50%		5.451.400					
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.451.400					
	100%		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	I dokumen	Melaksanakan Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5.451.400					
Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)			PROGRAM PEMENUHAN HAK AN	АК (РНА)	Persentase pemenuhan indikator KLA	62,50%		270.037.300					
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	Melaksanakan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	98.156.700					
		100%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisasi	Melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.459.200					

		27%	73%		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.697.500				
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 lembaga	Melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	171.880.600				
			100%		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000				
		10,92%	62,20%	26,87%	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	Melaksanakan Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.880.600				
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHU	SUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	1. 100%		395.154.670				
					Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	1 kegiatan	Melaksanakan kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	82.170.000				
	29,15%	24,34%	28,22%	18,30%	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 OPD	Melaksanakan Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	82.170.000				

						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak	45 kasus	Melaksanakan kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.033.660			
			59,60%		40,40%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	90 orang	Melaksanakan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.317.560			
		19,80%	37,40%	26,21%	16,59%	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 layanan	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	203.716.100			
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Luyanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yeng memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	Melaksanakan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.951.010			
			98,57%		1,43%	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layananperlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 orang	Melaksanakan kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layananperlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	70.020.000			
			71,24%		28,76%	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	5 orang	Melaksanakan kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	20.931.010			
Meningkatnya aseptor Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern					PROGRAM PENGENDALIAN PEND	UDUK				267.121.240			$\Lambda \gamma$
	modern (mCPR)					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data keluarga	I dokumen	Melaksanakan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	267.121.240			

		68,70%	25,84%	5,46%	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	Melaksanakan kegiatan	14.397.600			
7	7,35%	58,47%	3,63%	30,64%	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	Melaksanakan kegiatan	122.444.840			
		52,07%	3,68%	44,26%	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	Melaksanakan kegiatan	77.278.800			
11	1,32%	36,06%	38,72%	13,91%	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	Melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	53.000.000			
					PROGRAM PEMBINAAN KELUAR		1. Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	1. 84,00%		1.139.495.780			
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KI, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	2 layanan	Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	399.922.000			
		100,00%			Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pengendalian Program KKBPK	2.000.000			
18	8,07%	33,83%	37,77%	10,31%	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	127.000.000			
10	6,81%	25,21%	25,21%	32,77%	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakoream), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	95.196.000			

3,71%	36,97%	58,09%	1,24%	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	Melaksanakan kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.800.000				
	100,00%			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	14.700.000				
55,86%	13,48%	30,66%		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	Melaksanakan kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90.226.000				
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	Melaksanakan kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	144.000.000				
48,47%	49,86%	1,67%		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 kader	Melaksanakan kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	144.000.000				
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan KB	5 pelayanan	Melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	543.173.780				
29,15%	32,07%	18,37%	20,41%	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	34.300.000				

10,78%	62,64%	27,23%	1,32%	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	144 orang	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	476.724.000			
			100,00%	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	Melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	999.780			
53,45%	46,55%			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	31.150.000			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyanakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dIm pengelolan program KKBPK	85 mitra kerja	Melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan PembinaanKesertaan Ber- KB	52.400.000			
			100,00%	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	Melaksanakan kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1.000.000			
53,45%	46,55%			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	4 kampung	Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	51.400.000			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN SEJAHTERA (KS)	N PENINGKATAN KELUARGA	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%		658.693.850			

		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	74.493.850			
100%		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Ramaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	I laporan	Melaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina KeluargaRemaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	10.000.000			
100%		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesesjahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 unit	Melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.999.050			
100%		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 kader	Melaksanakan kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PFKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	46.577.600			

	25,26%	25,26%	25,26%	24,22%	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	7.917.200				
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kethanan dan Kesejahteraan Keluarga			Melaksanakan kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyanakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	584.200.000				
		41,12%	29,44%	29,44%	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	266.000.000				
		40,94%	29,53%	29,53%	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	Melaksanakan kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	318.200.000				
Meningkatnya Nilai SAKIP Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					PROGRAM PENUNJANG URUSAN KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%		4.072.301.843				
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 dokumen	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000				

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000				
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Iaporan	Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000				
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan WalidataPendukung Statistik Sektoral Daerah	1 laporan	Melaksanakan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan	Melaksanakan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	3.726.931.021				
	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.668.005.021				
	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.926.000				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 layanan	Melaksanakan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.493.820				
	44,42%	29,82%	25,86%		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.072.520				
		100,00%			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.979.500				
		33,33%	33,33%	33,34%	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Melaksanakan pelayanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000				
	12,44%	71,93%	15,63%		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	Melaksanakan pelayanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.441.800				

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	23 unit	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.277.850			
87,58%	12,42%			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	Melaksanakan pelayanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.277.850			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 layanan	Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.931.218		+	
100%				Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Melaksanakan pelayanan Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000			
24,87%	25,00%	25,00%	25,13%	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	75.931.218			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	36 unit	Melaksanakan pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.667.934			
12,21%	77,61%	6,11%	4,07%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	Melaksanakan pelayanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.269.000			
29,30%	40,49%	16,94%	12,82%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Melaksanakan pelayanan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	48.528.934			
	100%			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	Melaksanakan pelayanan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	9.870.000			

Tarakan, 11 Januari 2025

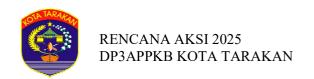
Kepala Dinas



Hasman Parigi, S.E., M.M

Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19720822 2010011 001







# BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anbak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan ini disusun sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan rencana kerja tahunan yang akan dicapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Aksi Capaian Kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para aparatur sebagai penerima amanah yang nantinya akan di evaluasi di akhir tahun yang akan dijadikan penilaian kinerja terhadap para aparatur.

Selain itu, Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anbak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan jumlah investasi di Kota Samarinda.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anbak serta Pengendalian Penduduk Kota Tarakan tahun 2025, dimana kami berharap dokumen ini dapat memberikan informasi dan data yang memadai mengenai rencana ataupun target yang ingin dicapai.